KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikanya penyusunan rancangan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada hakikatnya adalah komitmen bersama lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Harapan penyusunan Renstra ini, akan menjadi arah dan pedoman aparatur pemerintah Kecamatan Situbondo dalam mewujudkan peningkatan pelayanan yang professional, transparan dan akuntabel kepada masyarakat sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagaimana dalam Peraturan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi.

CAMAT SITUBONDO

Ir. QURROTUL AINI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670811 199901 2 001

Thank you for trying PDF Suite

DAFTAR ISI

Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematikan Penulisan 5

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Situbondo 7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Perangkat Daerah 29
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 31
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Situbondo 34
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 35
3.5. Penentuan Isu Isu Strategis 36

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 39

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Matrik Analisa SWOT 47
5.2 Strategi Dan Kebijakan 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Program, Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kecamatan Situbondo 49

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 50

BAB VIII PENUTUP 52

Thank you for trying PDF Suite

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1 Keberadaan Pegawai Kecamatan Situbondo 12

2.2 Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan 13

2.3 Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan 13

2.4 Daftar Aset / Barang Milik Daerah Kecamatan Situbondo..... 14

2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Situbondo..... 15

2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Situbondo..... 20

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD..... 30

3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... 33

3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra Kementrian/Lembaga 35

3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tata Ruang Wilayah 36

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Situbondo 40

4.2 Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran.....42

6.1 Program, Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kecamatan Situbondo..... 49

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD...50

Thank you for trying PDF Suite

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1 Gambar Struktur Kecamatan Situbondo 12

4.3 Gambar Pohon Kinerja Kecamatan Situbondo 46

Thank you for trying PDF Suite

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa **Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)** yang selanjutnya disebut **Renstra PD** adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021, maka perlu menyusun Renstra Kecamatan Situbondo Tahun 2016-2021.Penyusunan rencana strategis OPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap OPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) .Renstra Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2016 -2021 ini mengacu pada visi, dan misi Bupati Situbondo yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2016 -2021 berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 -2020 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Situbondo sangat penting bagi Kecamatan Situbondo dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Situbondo dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2016 -2021 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Situbondo disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam roda pemerintahan Renstra memiliki fungsi sebagai:

a. alat dalam memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang;
b. digunakan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;

Thank you for trying PDF Suite

c. sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai;
d. sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
e. menjadi alat / media untuk berkoordinasi dengan pihak lain serta mempermudah pencapain target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Situbondo. Sejajar dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 ;
2. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Situbondo;
3. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini dijabarkan dalam Kerja Tahunan (RKT) PD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD ;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran OPD (RKA SKPD) ;

Thank you for trying PDF Suite

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Kecamatan Situbondo sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun2016 - 2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat; .
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Thank you for trying PDF Suite

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
16. Paraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
17. Paraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021.
20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Situbondo;
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Situbondo.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Situbondo dimaksud untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Situbondo untuk secara konsukuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Situbondo bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Situbondo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Thank you for trying PDF Suite

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang, , maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Situbondo yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Kecamatan Situbondo.

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi PD

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih , telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021, dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kecamatan Situbondo

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis

Thank you for trying PDF Suite

3.5 Penentuan Isu – isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalamTabel T-C.25

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi danarah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.

6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dariTabel T-C.28.

7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan karyawati di lingkungan Kecamatan Situbondo serta para Pemangku Kepentingan “stakeholders” lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan atau kemajuan Iptek.

Thank you for trying PDF Suite

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pemerintah kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, sosial, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi, untuk itu perlu mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Pemerintah Kecamatan Situbondo berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Situbondo kepada Camat dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalampengambilan keputusan.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata terdiri dari :

1. **Camat** mempunyai tugas :
   a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
   b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
   e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
   g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

Thank you for trying PDF Suite

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada) dibantu oleh perangkat kecamatan camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

2. **Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan kecamatan.

   Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

   a. penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
   b. pengelolaan urusan keuangan;
   c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
   d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
   e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan;
   f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

   2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

   Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

   a. pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat;
   b. penyiapan dan pendisposisian surat keluar;
   c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler;
   d. penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya;
   e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
   f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

Thank you for trying PDF Suite

g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

a. penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan program kerja;
b. penyiapan rencana kegiatan;
c. penyiapan rencana kebutuhan kantor;
d. penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran;
e. pengelolaan urusan keuangan;
f. pembuatan laporan keuangan;
g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan Umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
b. pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa;
c. pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB);
d. pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
e. pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;
f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Thank you for trying PDF Suite

4. **Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai** tugas melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.

   Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

   a. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi;
   b. penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan sumberdaya alam;
   c. pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program pertanian dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;
   d. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi ;
   e. penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat;
   f. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
   g. pembinaan pelayanan umum;
   h. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
   i. penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   j. penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan;
   k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
   l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
   m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

5. **Seksi Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejateraan rakyat.

   Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

   a. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
   b. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;
   c. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;

Thank you for trying PDF Suite

d. penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai tugas membantu camat untuk melaksanakan tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi
   a. pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;
   b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum ;
   c. penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
   d. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
   e. pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
   f. pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
   g. pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;
   h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
   i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
   j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Thank you for trying PDF Suite

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kecamatan Situbondo adalah sebagai berikut : **Gambar 2.1**

Struktur Kecamatan Situbondo

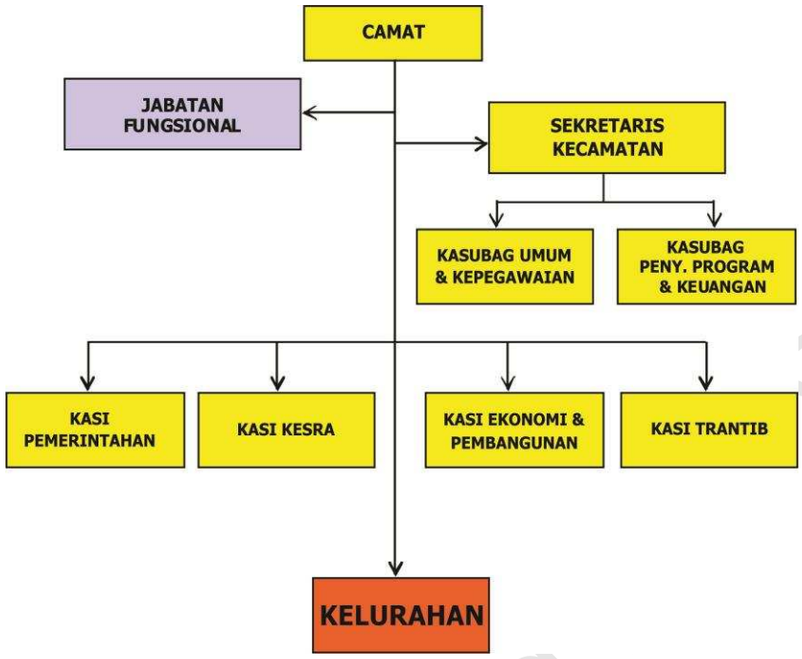

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1) Komposisi Pegawai

Secara keselurahan jumlah personil Kecamatan Situbondo adalah sebanyak 25 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Situbondo adalah sebagaimana ditunjukkan tabel.

Tabel 2.1

Keberadaan Pegawai Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Situbondo

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		L	P	Jumlah
1.	Camat	-	1	1
2.	Sekretariat			
2.1	Sekretaris Camat	1	-	1
2.1.1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1	1
2.1.1.1	Staf Pendukung PNS	2	1	3
2.1.2	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	-	1	1
2.1.2.1	Staf Pendukung PNS	1	1	2
3.	Seksi-seksi			
3.1	Kasi Pemerintahan	1	-	1
3.1.1	Staf Pendukung PNS	3	-	3
3.2	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	1	-	1
3.2.1	Staf Pendukung PNS	1	2	3
3.3	Kasi Kesejahteraan Rakyat	-	1	1
3.3.1	Staf Pendukung PNS	2	-	2
3.4	Kasi ketentraman dan Ketertiban	1	-	1
3.4.1	Staf Pendukung PNS	3	-	3
3.4.2	Non PNS	1	-	1
4	Kelompok jabatan Fungsional	-	-	-

(sumber : sub bagian umum dan kepegawaian kecamatan situbondo)

Thankyou for trying Suite

2) Pegawai menurut Pangkat dan Golongan

Dari komposisi Pegawai Kecamatan Situbondo yang keseluruhan berjumlah 25 Orang terdapat :

Tabel 2.2

Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai (Orang)		Ket
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina	IV/a		1	
2	Penata Tk. I	III/d	2		
3	Penata	III/c	3	2	
4	Penata Muda Tk. I	III/b	2		
5	Penata Muda	III/a	2	3	
6	Pengatur Tk. I	II/d	1		
7	Pengatur	II/c	5		
8	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1		
9	Pengatur Muda	II/a	-	-	
10	Non PNS/THL	-	1		
Jumlah			**17**	**8**	

(sumber : sub bagian umum dan kepegawaian kecamatan Situbondo)

3) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Situbondo, adalah sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS terdapat :

Tabel 2.3

Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)		Ket
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sarjana Strata Dua (S2)	1	1	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	3	4	
3	Diploma Tiga (D3)	1		
4	SLTA/Sederajat	15		
Jumlah		**19**	**5**	

(sumber : sub bagian umum dan kepegawaian kecamatan situbondo)

4) Aset/ Modal Kecamatan Situbondo

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Situbondo dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Secara keseluruhan jumlah peralatan/ perlengkapan kerja atau aset baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dikelola oleh Kecamatan Situbondo sebesar Rp. Rp. 2.712.189.700,- yang didalamnya mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Thank you for trying PDF Suite

Tabel 2.4

Daftar Aset / Barang Milik Daerah Kecamatan Situbondo

No.	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga dan Rupiah
1	Tanah	1.805 M^2	631.750.000
2	Bangunan Gedung	10 unit	1.075.057.000
3	Alat Angkut		270.000.000
	o Mobil	2 unit	245.950.000
	o Motor	9 unit	113.529.000
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	180 unit	375.903.700
	Total		2.712.189.700

Sumber : Data Inventaris Barang Kecamatan (KIB)

Thank you for trying PDF Suite

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	8	9	10	9	10	8	9	10	9	10	18	19	20	19	20
1	Prosentase Tersusun dan tersedianya laporan kinerja SKPD	100%	Jumlah dokumen LAKIP SKPD disusun		1 dok	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok			100%	100%	100%		
			Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang disusun		1 dok	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok			100%	100%	100%		
			Jumlah usulan yang diakomodir RKPD		20 usulan	15 usulan	10 usulan			20 usulan	15 usulan	10 usulan			75%	80%	100%		
			Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun		4 dok	4 dok	4 dok			4 dok	4 dok	4 dok			100%	100%	100%		
			Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun		2 dok	2 dok	2 dok			2 dok	2 dok	2 dok			100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
2	Prosentase penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Jumlah desa dengan pelaporan ADD tertib dan tepat waktu		4 desa	4 desa	4 desa			4 desa	4 desa	4 desa			100%	100%	100%		
3	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tertib administrasi	100%	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi baik dan tertib		6 des/kel	6 des/kel	6 des/kel			6 des/kel	6 des/kel	6 des/kel			100%	100%	100%		
4	Prosentase partisipasi organisasi perempuan	100%	Jumlah organisasi perempuan yang dibina		6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok			6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok			100%	100%	100%		
5	Prosentase pelastarian nilai-nilai budaya dan agama	100%	Jumlah partisipasi kegiatan Harjakasi		1 keg	1 keg	1 keg			1 keg	1 keg	1 keg			100%	100%	100%		
			Jumlah kegiatan PHBA yang dilaksanakan		12 keg	12 keg	12 keg			12 keg	12 keg	12 keg			100%	100%	100%		
			Jumlah kegiatan PHBN yang dilaksanakan		1 keg	1 keg	1 keg			1 keg	1 keg	1 keg			100%	100%	100%		
6	Prosentase fasilitasi pendistribusian RASKIN	100%	Jumlah desa dan kel yang di monitoring dan evaluasi		6 des/kel	6 des/kel	6 des/kel			6 des/kel	6 des/kel	6 des/kel			100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
7	Prosentase peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	Jumlah desa dan kel yang melaksanakan BBGRM		6 des/kel	6 des/kel	6 des/kel			6 des/kel	6 des/kel	6 des/kel			100%	100%	100%		
			Jumlah desa dan kel yang mengikuti Lomba Desa		6 des/kel	6 des/kel	6 des/kel			6 des/kel	6 des/kel	6 des/kel			100%	100%	100%		
			Jumlah prosentase perolehan PBB		75%	78%	80%			58%	60%	70%			77.33%	76.92%	87.50%		
8	Prosentase kesadaran hukum dan ketertiban dan keamanan masyarakat	100%	Jumlah Satgas linmas yang dibina		80 Satgas	60 Satgas	60 Satgas			80 Satgas	60 Satgas	60 Satgas			100%	100%	100%		
9	Prosentase Pengembangan data informasi/ Statistik Daerah	100%	Jumlah dokumen monografi dan profil yang disusun		2 dok	2 dok	2 dok			2 dok	2 dok	2 dok			100%	100%	100%		
10	Prosentase penataan daerah otonomi baru	100%	Jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan K3		-	-	2 desa			-	-	2 desa			-	-	100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Prosentase fasililtasi Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)		Nilai IKM Kecamatan Situbondo (70.89)					70.89					70.50					100%	
2	Prosentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa		Jumlah desa dengan pelaporan ADD yang baik dan tertib					4 Desa					4 Desa					100%	
3	Prosentase penataan daerah otonomi Baru		Jumlah desa / kelurahan yang difasilitasi					4 Desa					4 Desa					100%	
4	Prosentase pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan		Jumlah usulan Musrenbang yang diakomodir RKPD					10 Usulan					10 Usulan					100%	
5	Prosentase Peningkatan Keberdayaan masyarakat perdesaan		Jumlah kelompok/lembaga yang difasilitasi					6 Kelompok					6 Kelompok					100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Situbondo		Nilai Survey IKM Kecamatan Situbondo (75.29)						75.29					77.25					102%
			Jumlah desa dengan pelaporan ADD yang baik dan tertib						4 Desa					4 Desa					100%
			Prosentase perolehan pungutan PBB						70%					48%					68%
			Usulan Musrenbang yang diakomodir RKPD						10 Usulan					10 Usulan					100%

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelavanan Administrasi Perkantoran	156,222,000	161,935,000	178,307,000			155,222,000	142,544,000	174,266,200	142,544,000	174,266,200	99.36%	88.03%	97.73%			137,379,840	96%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214,785,000	157,001,000	110,223,000			211,500,000	157,001,000	110,000,000	157,001,000	110,000,000	98.47%	100.00%	99.80%			180,350,200	99%
Program peningkatan disiplin aparatur	3,900,000	22,400,000	9,450,000			3,900,000	22,400,000	9,450,000	22,400,000	9,450,000	100.00%	100.00%	100.00%			8,640,000	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16,763,000	32,677,000	16,000,000			16,763,000	32,677,000	16,000,000	32,677,000	16,000,000	100.00%	100.00%	100.00%			17,376,000	100%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	85,590,000	22,490,000	21,500,000			85,590,000	22,490,000	21,500,000	22,490,000	21,500,000	100.00%	100.00%	100.00%			52,132,000	100%
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	25,000,000	25,000,000	34,500,000			25,000,000	25,000,000	34,500,000	25,000,000	34,500,000	100.00%	100.00%	100.00%			16,900,000	60%

Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	52,050,000	4,230,000	55,885,000			52,050,000	54,230,000	55,885,000	54,230,000	55,885,000	100.00%	100.00%	100.00%			52,699,000	100%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	16,500,000	17,250,000	17,250,000			17,250,000	17,250,000	17,250,000			100.00%	100.00%	100.00%			14,316,000	100%
Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000	5,000,000			100.00%	100.00%	100.00%			5,000,000	100%
Program Penyediaan Dukungan Data/ Informasi	3,900,000	4,000,000	5,000,000			4,000,000	5,000,000	5,000,000			100.00%	100.00%	100.00%			3,880,000	100%
Program Pelaksanaan Harjakasi			20,000,000					20,000,000			0.00%	0.00%	100.00%			10,000,000	20%
Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN	20,000,000	35,000,000	44,780,000			35,000,000	44,780,000	44,780,000			100.00%	100.00%	100.00%			25,756,000	100%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	55,700,000	63,800,000	77,000,000			63,800,000	77,000,000	77,000,000			100.00%	100.00%	100.00%			59,110,000	100%

Thank you for trying PDF Suite

TAHUN 2016

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				161.935.000					143.672.400								100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				157.001.000					156.368.500								100%
Program peningkatan disiplin aparatur				22.400.000					5.400.000								100%
Program Penyediaan Dukungan Data/ Informasi / Statistik Daerah				3.440.000					3.440.000								100%
Program pengembangan nilai budaya				51.655.000					51.655.000								100%
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan				5.112.000					5.112.000								100%
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				8.650.000					8.650.000								100%
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				7.500.000					7.500.000								100%

TAHUN 2016

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program peningkatan masyarakat dalam membangun desa				30.010.000					30.010.000								100%
Program peningkatan peran serta jender dalam pembangunan				9.180.000					9.180.000								100%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				22.490.000					22.490.000								100%
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				25.000.000					25.000.000								100%

Thanks for using PDF Suite

TAHUN 2017

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					427.673.000					427.673.000							100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					543.033.500					543.033.500							100%
Program peningkatan disiplin aparatur					20.300.000					20.300.000							100%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					68.154.500					68.154.500							100%
Program penyusunan pembangunan daerah					5.000.000					5.000.000							100%
Program Penyediaan Dukungan Data/ Informasi / Statistik Daerah					5.500.000					5.500.000							100%
Program Pelaksanaan HARJKASI					44.500.000					44.500.000							100%
Program Dukungan pelaksanaan PHBA dan PHBN					248.987.000					248.987.000							100%

TAHUN 2017

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program peningkatan manajemen aset daerah					5.000.000					5.000.000							100%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					28.000.000					28.000.000							100%
Program Penataan Daerah Otonomi Baru					380.818.000					380.818.000							100%
Program pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan					149.399.000					149.399.000							100%
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan					55.195.000					55.195.000							100%

Thanks for using PDF Suite

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil ada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, Serta tata kerja kecamatan Kabupaten Situbondo Hal ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh aparat kecamatan;
2. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/684/P006.2/2014 tentang Kecamatan Pelaksana Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Situbondo;
3. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
4. Pola kerja di Kecamatan Situbondo yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,efisien, dan efektif
5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
6. Pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui IKM Kecamatan.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dan jumlah pegawai di kecamatan Situbondo .
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana gedung pelayanan serta Tekhnologi Informasi Komputer (TIK) yang ada di Kantor Kecamatan Situbondo sehingga mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah tertata dengan baik.
2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Situbondo
3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan Berprakarsa seluas – luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
4) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*)
5) Ditetapkannya RPJPMD Kabupaten Situbondo merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo

Thank you for trying PDF Suite

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
2) Adanya perantara/calo dalam pengurusan administrasi paten.

3. STRATEGI

1) Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang menggunakan Tekhnologi Informasi Komputer (TIK) kepada masyarakat.
2) Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efesien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Desa.
3) Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
4) Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
5) Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.
6) Melibatkan keterwakilan perempuan, Disabilitas dan Anak pada Musyawarah rencana Pembangunan Kecamatan.
7) Pelayanan dan Pembangunan yang ramah anak dan disabilitas
8) Pelestarian lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan peran FKKS, Desa Sehat dan masyarakat
9) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan UMKM sebagai pengungkit ekonomi rakyat
10) Mengoptimalkan Tim Tagana Kecamatan Dan Desa pada Penanggulangan Bencana
11) Memotivasi Desa yang bersinergi dengan BUMDES untuk berinovasi menciptakan Destinasi wista baru yang integratif dengan Potensi masing- masing Desa

4. KEBIJAKAN

1) Membangun sistem pelayanan prima yang cepat , efisien ,nyaman dan transparan melalui penggunaan Tekhnologi Informasi Komputer (TIK)
2) Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan Iptek
3) Pelayanan prima kepada masyarakat serta mengkondisikan gedung pelayanan , lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman.
4) Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat.
5) Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ramah Anak dan disabilitas dan meningkatkan kepercayaaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di kecamatan
6) Mengupayakan Keterlibatan Pemerintah dan semua elemen masyarakat pada pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan Bencana
7) Membangun Peran Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, dan UMKM sebagai pengungkit ekonomi rakyat

Thank you for trying PDF Suite

8) Peningkatan Peran Perempuan, Disabilitas dan anak pada pengambilan Keputusan di Musyawarah Rencana Pembangunan untuk memastikan semua lapisan masyarakat baik laki – laki maupun perempuan bisa terlibat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua sebagai implementasi dari strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Thank you for trying PDF Suite

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pengertian Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Situbondo, maka **Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan** yang berkembang terhadap Kecamatan Situbondo yang berhasil diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

- Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.
- Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Thank you for trying PDF Suite

Thank you

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
OPD Kecamatan Situbondo

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan	Peningkatan prosentase jumlah aparatur kecamtan	Analasis Jabatan	Kebijakan Pimpinan OPD	a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Situbondo	Belum terpenuhinya jumlah aparatur kecamatan
	Peningkatan kompetensi aparatur kecamatan	Analasis Jabatan	Kebijakan Pimpinan OPD	a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Situbondo	Belum tersedianya maksimal aparatur yang mempunyai kemampuan teknis
Peningkatan Sarana dan Prasarana	Penambahan sarana dan prasarana kantor	Standar Pelayanan Publik	Kebijakan Pimpinan OPD	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Belum tersedianya saranan dan prasarana pelayanan yang memadai

PDF Suite

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan “

Telaahan Penjabaran pada Visi tersebut tercermin pada Indikator Visi yaitu : IPM, PDRB, Pendapatan Perkapita, Nilai Lakip, Gini Ratio, Indeks Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, IKM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilan BPK dan Angka Kemiskinan.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Tahun 2016 – 2021 misi Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

Misi ke -1 :

MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN

Pernyataan misi pertama ini memiliki tujuan yaitu :

MENINGKATKAN KUALITAS SDM

Misi ke-2 :

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN

Pernyataan misi kedua ini memiliki tujuan yaitu :

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Thank you for trying PDF Suite

Misi ke-3 :

MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL DAN DINAMIS BERBASIS POTENSI LOKAL

Pernyataan misi ketiga ini memiliki tujuan yaitu :

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN

Misi ke- 4

MENINGKATKAN TATA KELOLA YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pernyataan misi keempat ini memiliki tujuan yaitu :

MENINGKATKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Situbondo, tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Situbondo Tahun 2016 – 2021 tertuang pada Misi Keempat Kabupaten Situbondo yaitu meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan Untuk meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik dengan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi birokrasi .

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Situbondo sesuai RPJMD adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik . Tercapainya sasaran tersebut diukur dengan indikator sasaran yaitu IKM

Thank you for trying PDF Suite

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan				
No	**Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih**	**Permasalahan Pelayanan OPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
	MISI 4 :			
	Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Belum tercapainya pelayanan Kecamatan Situbondo	Kurang terpenuhinya jumlah aparatur kecamatan	Letak strategis Kecamatan Situbondo berada di dalam Kota Situbondo
			Belum tersedianya maksimal aparatur yang mempunyai kemampuan teknis	
			Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai	

Thank you PDFSuite

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Situbondo.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementrian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Situbondo pada tahap kedua RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Thank you for trying PDF Suite

Tabel 3.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra Kementrian/Lembaga

Aspek Capaian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Standar Pelayanan Publik	75,58%	Keputusan Menteri Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan	1. Belum tersedianya Anggaran 2. Belum memadainya sumber daya apartur 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana	Kurangnya Kesadaran masyarakat tentang pelayanan	Belum tersedianya Sumber Daya aparatur yang memiliki kompetensi

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang Kabupaten Situbondo yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sub sistem yang berarti juga meningkatnya daya tamping. Oleh karenanya pengolahan sub sistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Situbondo yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfataan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Situbondo serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Situbondo. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Memperkuat struktur ekonomi yang maksimum terhadap pengembangan industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tamping wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Situbondo tahun 2016 -2021 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

a. Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat.

Thank you for trying PDF Suite

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
c. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
d. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
e. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.
f. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi.
g. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.
h. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.
i. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.
j. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Tabel. 3.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tata Ruang Wilayah

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban	1. Membuang sampah disungai 2. Open Defecation Free (ODF)	1. Belum ada peraturan yang mengatur dan pemberian sanksi terhadap pelanggar 2. Lemahnya pengawasan 3. Kurangnya Kesadaran masyarakat	1. Menimalisirkan masalah sampah dan ODF **2.** Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan , Pemerintah Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Thank you for trying F Suite

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Situbondo. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima dan tuntutan masyarakat yang menginginkan akses pelayanan publik yang mudah transparan dan nyaman melalui penggunaan Tekhnologi Informasi Komputer (TIK)
2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak selaras dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Situbondo yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Situbondo, sebagai berikut :

1) Membangun sistem pelayanan prima yang cepat , efisien ,nyaman dan transparan melalui penggunaan Tekhnologi Informasi Komputer (TIK).
2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Thank you for trying PDF Suite

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Thank you for trying PDF Suite

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

TUJUAN :

- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Situbondo yang Baik

SASARAN :

Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan.
- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Thank you for trying PDF Suite

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Situbondo

Tujuan	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Sasaran	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	IKM Kecamatan Situbondo	B (75,29)					Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Situbondo	Hasil survey IKM Kecamatan Situbondo	B (75,29)					IKU
								Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik	90%					
								Persentase Desa dengan Perolehan Pungutan PBB 70%	70%					
								Persentase kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk dalam RKPD	60%					
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	IKM Kecamatan Situbondo		B (80)	B (81)			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai survey IKM Kecamatan Situbondo		B (80)	B (81)			IKU
							Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang tertib dan baik		100%	100%			
								Persentase usulan kegiatan masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk RKPD		70%	80%			
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai survey IKM				B (82)	B (85)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey IKM Kecamatan Situbondo				B (82)	B (85)	IKU

Situbondo yang baik							Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang tertib dan baik				100%	100%	
								Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti				100%	100%	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (65)	BB (70)	BB (80)	A (81)	A (82)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (65)	BB (70)	BB (80)	A (81)	A (82)	NON IKU

Thanks for trying PDF Suite

Tabel 4.2
Formulasi Perhitungan Indikator Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Situbondo	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	IKM = Total dari Nilai Persepsi per unsur / Total unsur yang diisi X Nilai Penimbang	Kasubag Umum	Laporan IKM
			Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	Jumlah desa yang melaksanakann pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik / % Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan X 100	Kasi Pemerintahan	Laporan SPJ ADD dan DD
			Persentase Desa dengan administrasi baik	Jumlah Desa dengan administrasi baik / Jumlah keseluruhan desa X 100 %	Kasi Pemerintahan	Administrasi Desa
			Persentase Perolehan Pungutan PBB	Jumlah desa dengan perolehan Pungutan 100 % / Jumlah keseluruhan desa yang memungut PBB X 100 %	Kasi Pemerintahan	Laporan PBB
			Usulan Kegiatan Prioritas Desa pada Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah usulan musrenbang yang masuk dalam RKPD	Kasi Pembangunan	Laporan Musren bang

Tabel 4.3

Thank you for trying PDF Suite

Formulasi Perhitungan Indikator Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA	KET
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Situbondo	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per unsur / Total unsur yang diisi) X Nilai Penimbang	Kasubag Umum	Laporan IKM
			Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik	(Jumlah desa yang melaksanakann pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik / % Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan) X 100	Kasi Pemerintahan	Laporan SPJ ADD dan DD
			Persentase Desa dengan Perolehan Pungutan 100%	(Jumlah desa dengan perolehan Pungutan 100 % / Jumlah keseluruhan desa yang memungut PBB) X 100 %	Kasi Pemerintahan	Laporan PBB
			Persentase kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk dalam RKPD	(Jumlah usulan musrenbang yang masuk dalam RKPD / Jumlah keseluruhan usulan musrenbang kecamatan) X 100 %	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Laporan Musren bang

Tabel 4.4
Formulasi Perhitungan Indikator Tahun 2018 dan 2019

Thank you for trying PDF Suite

NO	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	Nilai survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	IKM = Total dari Nilai Persepsi per unsur / Total unsur yang diisi X Nilai Penimbang	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Kasi Pemerintahan 3. Kasi Perekonomian dan Pembangunan 4. Kasi Kesejahteraan Rakyat 5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Dokumen IKM
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik / Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan X 100 %	1. KasiPemerintahan 2. Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Laporan SPJ ADD dan DD
		Prosentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	Jumlah usulan musrenbang yang masuk dalam RKPD / Jumlah keseluruhan usulan musrenbang kecamatan (10 Usulan) X 100 %	1. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan 2. Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Daftar Usulan Musrenbang dan Berita Acara Hasil Verifikasi Musrenbang Kabupaten terhadap Hasil Musrenbang Kecamatan.

Tabel 4.5
Formulasi Perhitungan Indikator Tahun 2020 dan 2021

Thank you for trying PDF Suite

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU				
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	Nilai Surrvei IKM Kecamatan Situbondo	IKM = Total dari Nilai Persepsi per unsur / Total unsur yang diisi X Nilai Penimbang	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Laporan IKM
	Meningkat nya kualitas penyelengga raan pemerinta han Kecamatan dan Pembinaan Pemerinta han Desa		Persentase Desa denga pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	Jumlah desa yang melaksanakann pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik / % Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan X 100	Kasi Pemerintahan	Laporan SPJ ADD dan DD
			Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti / 100% Jumlah keseluruhan rekomendasi hasil koordinasi X	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Perekonomian dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Kasi Ketentraman danKetertiban	Dokumen Rekomendasi

Thank you for trying PDF Suite

Gambar 4.3
Pohon Kinerja Kecamatan Situbondo

Sasaran RPJMD yang diampu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	
Indikator sasaran RPJMD	IKM Kabupaten	
Tujuan OPD	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Situbondo yang baik	
Indikator Tujuan OPD	Nilai Hasil Survei IKM	
Sasaran OPD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa
Indikator Sasaran OPD	Nilai Survei IKM	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang tertib dan baik Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti
Program Prioritas OPD	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa
Indikator Program	Persentase pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan yang sesuai SOP	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang tertib dan baik Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti

Thank You for using PDF Suite

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 MATRIK ANALISA SWOT

MATRIK SWOT

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	***KEKUATAN (STRENGHT)*** 1. Perda Nomor 68 Tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan 2. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/684/P/006.2/2014 tentang Kecamatan Pelaksana PATEN 3. SDM aparatur Kecamatan Situbondo sangat memadai dari tingkat pendidikan dan profesional serta mempunyai integritas yang tinggi 4. Sistem pelayanan publik yang baik 5. Hubungan kerja dan koordinasi yang kondusif dan nyaman 6. Hasil survey kepuasan sesuai dengan standarisasi pelayanan publik.	**KELEMAHAN (WEAKNESSES)** 1. Belum tersedia tenaga teknis khusus untuk memberikan pelayanan Paten 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana gedung pelayanan 3. Belum tersedianya aplikasi pelayanan berbasis teknologi
KESEMPATAN (OPPORTUNITIES) 1. Sistem dan birokrasi tertata dengan baik. 2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas 3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan Berprakarsa seluas – luasnya bagi Kecamatan 4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) 5. Ditetapkannya RPJPMD Kabupaten Situbondo merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo	**STRATEGI (S-O)** 1. Menjadikan Kecamatan dapat melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) sesuai dengan surat keputusan 2. Memberikan Kepastian hukum terhadap produk-produk pelayanan yang disediakan 3. Menciptakan layanan kecamatan situbondo “AKTIF” (Amanah, Komitmen, Transparan dan Familier) 4. Progressing hasil survey kepuasaan masyarakat	**STRATEGI (W-O)** 1. Kepimpinan Camat yang visioner dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pelayanan 2. Kwalitas SDM yang mempunyai integritas dapat berinovasi untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat
ANCAMAN (THREATS) 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan. 2. Adanya perantara/Calo pengurusan administrasi Paten 3. Adanya Pungli Petugas PATEN Kecamatan	**STRATEGI (S-T)** 1. Melaksanakan Zona Integritas (ZI) dengan menerapkan kedisiplinan kepada aparatur Kecamatan Situbondo 2. Menyediakan kotak saran serta kuisioner bagi masyarakat	**STRATEGI (W-T)** 1. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan Paten Kecamatan 2. Membuat komitmen dan Maklumat bersama tentang Bebas Pungutan Liar

Thank you for trying PDF Suite

5.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan			
Misi : Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Situbondo Yang Baik.	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminsitrasi Terpadu kecamatan Situbondo	• Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik • Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan berbasis teknologi • Memberikan fasilitasi pelayanan inklusi	Pembangunan ZONA INTEGRITAS (ZI) menuju Wilayah Zona Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa	• Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa • Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa • Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan menuju *Good Governance*

Thank you for trying PDF Suite

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SITUBONDO

Dalam rangka sinkronisasi dan memformulasikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimiliki Kecamatan Situbondo dengan RPJM Daerah Kabupaten Situbondo, maka program dan kegiatan yang akan di jalankan selama periode 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :

Thank you for trying PDF Suite

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*, karena indikator kinerja memiliki alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan kata lain fungsi dari indikator kinerja adalah menjelaskan informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas dengan menggunakan ukuran secara kuantitatif yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan suatu organisasi dalam pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tinggkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Secara sederhana Indikator Kinerja akan menjadi tolak ukur evaluasi dan Indikator Kinerja Kunci yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Situbondo bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Situbondo dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut ini :

Thank you for trying PDF Suite

Thank you PDF Suite

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	C (70,50)	C (70,89)	C (72,36)	B (80)	B (81)	B (82)	B (85)	B (85)
2	Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik	100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Desa dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	30%	60%	70%					
4	Persentase kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk dalam RKPD	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Perubahan Kecamatan Situbondo Tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Situbondo dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaanya sebagaimana ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Perubahan Kecamatan Situbondo 2016-2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Situbondo dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
2. Renstra Perubahan Kecamatan Situbondo Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Situbondo, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketrentaman dan Ketertiban, dan Seksi Kesejahteraan Rakyat) serta Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan) yang ada di lingkungan Kecamatan Situbondo. Sesuai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo.
3. Renstra Perubahan Kecamatan Situbondo Tahun 2016-2021 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Situbondo (Renja Kecamatan Situbondo) untuk setiap tahunnya dengan tetap mangacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo.
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Situbondo, keberadaan Renja Kecamatan Situbondo harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Situbondo (RKA-Kecamatan Situbondo).
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-SKPD Kecamatan Situbondo Tahun 2016-2021 yang tercermin dari Renja-SKPD Kecamatan Situbondo, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan kelembagaan dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Situbondo, 26 Agustus 2019

CAMAT SITUBONDO

Ir. QURATUL AINI
, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670811 199901 2 001

Thank you for trying PDF Suite

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	1. Nilai Indek Survei Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Indek Survei Kepuasan Masyarakat	**1.20**	**URUSAN KECAMATAN**																	
				1.20.1.20.18.19	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	1 **Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan desa yang tertib dan baik**		**100%**	21.500.000	**100%**	28.000.000									**100%**	**49.500.000**	**Kec. Sit**
						2 **Hasil Surveiy Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan Situbondo**		B (70)		B (73.50)										**A (85)**		
					Verifikasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa Binaan yang mengelola keuangan Desa sesuai dengan perbup No.42 Tahun 2015 dengan benar dan tepat waktu		4 Desa	21.500.000	4 Desa	28.000.000									**4 Desa**	**49.500.000**	**Kec. Sit**
					Program Penataan Daerah otonomi Baru	Hasil Surveiy Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan Situbondo		B (70)														
					Pendampingan Kota Sehat	Jumlah Desa yang melaksanakan Desa Sehat		6 Des/Kel	20.000.000	6 Des/Kel	20.000.000			`						6 Des/Kel	40.000.000	Kec. Sit
					Dukungan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan	Jumlah Desa yang melaksanakan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban				6 Des/Kel	75.000.000									6 Des/Kel	75.000.000	Kec. Sit
					Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen data AKP yang disusun				1 dokumen	10.000.000									5 dokumen	10.000.000	Kec. Sit
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1 Persentase Desa dengan Perolehan Pungutan PBB 100%		70%	86.000.000	75%	89.200.000									100%	175.200.000	Kec. Sit
						2 Persentase kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk RKPD		60%		60%										100%		
						3 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan Situbondo		B (70,00)		B (73,50)										A (85)		
					Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa binaan yang melaksanakan tata pemerintahan yang baik		6 Des/Kel	6.000.000	6 Des/Kel	6.000.000									6 Des/Kel	12.000.000	Kec. Sit
					Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa yg mengikuti lomba desa tingkat kecamatan		6 Des/Kel	10.000.000	6 Des/Kel	6.200.000									6 Des/Kel	16.200.000	Kec. Sit
					Pembinaan Kamtibmas dan Linmas	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan Kamtibmas linmas		6 Des/Kel	15.000.000	6 Des/Kel	17.000.000									6 Des/Kel	32.000.000	Kec. Sit
					Pembinaan PBB	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan PBB		6 Des/Kel	15.000.000	6 Des/Kel	17.000.000									6 Des/Kel	32.000.000	Kec. Sit
					Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah desa yg menyelenggarakan kegiatan BBGRM		6 Des/Kel	5.000.000	6 Des/Kel	5.000.000									6 Des/Kel	10.000.000	Kec. Sit
					Peningkatan Musrenbang	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan		1 kali	20.000.000	1 kali	23.000.000									6 kali	43.000.000	Kec. Sit
					Pelaksanaan program raskin	Jumlah desa yang melaksanakan program raskin		6 Des/Kel	15.000.000	6 Des/Kel	15.000.000									6 Des/Kel	30.000.000	Kec. Sit
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan Situbondo		B (70,89)	16.000.000	B (73,50)	20.000.000									A (85,50)	36.000.000	Kec. Sit
					Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi PKK Desa dan kelurahan yang dibina		6 Des/Kel	10.000.000	6 Des/Kel	20.000.000									6 Des/Kel	30.000.000	Kec. Sit
					Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan		6 Des/Kel	6.000.000		-									6 Des/Kel	6.000.000	Kec. Sit

Thank you for using PDF Suite

1	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Situbondo Yang Baik	Nilai Indek Survei Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Situbondo	**1.20**	**URUSAN KECAMATAN**																	
				1.20.1.20.18.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan desa yang tertib dan baik						100%	22.920.000									
		2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan Pemerintahan Desa	1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti			2 Hasil Surveiy Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan Situbondo						B (75,50)										
			2. Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan baik	1.20.12017.19.05	Verifikasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa Binaan yang mengelola keuangan Desa sesuai dengan perbup No.42 Tahun 2015 dengan benar dan tepat waktu						4 Desa	22.920.000									
				1.20.1.20.18.27	Program Penataan Daerah otonomi Baru	Hasil Surveiy Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan Situbondo						B (75,50)	130.000.000									
				1.20.1.20.18.27.05	Pendampingan Kota Sehat	Jumlah Desa yang melaksanakan Desa / kelurahan Sehat						6 Des/Kel	20.000.000									
				1.20.1.20.18.27.06	Dukungan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan	Jumlah Desa yang melaksanakan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban						6 Des/Kel	100.000.000									
				1.20.1.20.18.27.07	Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen data AKP yang disusun						1 dokumen	10.000.000									
				1.20. 12.017.33	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						B (75,50)	97.000.000									
						2. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti						100%										
				1.20.1.20.18.33.04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa binaan yang melaksanakan tata pemerintahan yang baik						6 Des/Kel	10.000.000									
				1.20.1.20.18.33.06	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa yg mengikuti lomba desa tingkat kecamatan						6 Des/Kel	10.000.000									
				1.20.1.20.18.33.07	Pembinaan Kamtibmas dan Linmas	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan Kamtibmas linmas						6 Des/Kel	30.000.000									
				1.20.1.20.18.33.10	Pembinaan PBB	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan PBB						6 Des/Kel	20.000.000									
				1.20.1.20.18.33.11	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah desa yg menyelenggarakan kegiatan BBGRM						6 Des/Kel	5.000.000									
				1.20.1.20.18.33.08	Peningkatan Musrenbang	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						1 kali	12.000.000									
				1.20.1.20.18.33.12	Pelaksanaan program raskin	Jumlah desa yang melaksanakan program raskin						6 Des/Kel	10.000.000									
				1.22.1.20.18.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan Situbondo						B (75,50)	20.000.000									
				1.22.1.20.18.15.01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi PKK Desa dan kelurahan yang dibina						6 Des/Kel	10.000.000									
				1.22.1.20.18.15.02	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan						6 Des/Kel	10.000.000									

Thank you for using PDF Suite

1	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Situbondo Yang Baik	Nilai Indek Survei Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Situbondo	**1.20**	**URUSAN KECAMATAN**																	
				1.20.1.20.18.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan desa yang tertib dan baik								100%	57.000.000					100%	0	Kec. Sit
		2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan	1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti			2 Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan Situbondo								B (78.50)						A (85)		
			2. Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan baik	1.20.1.20.18.19.05	Verifikasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa Binaan yang mengelola keuangan Desa sesuai dengan perbup No.42 Tahun 2015 dengan benar dan tepat waktu								4 Desa	57.000.000					4 Desa	0	Kec. Sit
				1.20.1.20.18.33	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)								B (78.50)	107.000.000					A (85)	107.000.000	Kec. Sit
						2. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti								100%						100%		
				1.20.1.20.18.33.04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa binaan yang melaksanakan tata pemerintahan yang baik								6 Des/Kel	12.000.000					6 Des/Kel	12.000.000	Kec. Sit
				1.20.1.20.18.33.06	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa yg mengikuti lomba desa tingkat kecamatan								6 Des/Kel	10.000.000					6 Des/Kel	10.000.000	Kec. Sit
				1.20.1.20.18.33.07	Pembinaan Kamtibmas dan Linmas	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan Kamtibmas linmas								6 Des/Kel	25.000.000					6 Des/Kel	25.000.000	Kec. Sit
				1.20.1.20.18.33.08	Pembinaan dan Monitoring Administrasi PBB	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan PBB								6 Des/Kel	25.000.000					6 Des/Kel	25.000.000	Kec. Sit
				1.20.1.20.18.33.08	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah desa / kelurahan yang menyusun laporan kegiatan BBGRM								6 Des/Kel	10.000.000					6 Des/Kel	10.000.000	Kec. Sit
				1.20.1.20.18.33.09	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan								1 kali	15.000.000					6 kali	15.000.000	Kec. Sit
				1.20.1.20.18.33.10	Fasilitasi Pelaksanaan Raskin	Jumlah desa yang melaksanakan program raskin								6 Des/Kel	10.000.000					6 Des/Kel	10.000.000	Kec. Sit
				1.22.1.20.18.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan Situbondo								B (83,29)	370.000.000					B (83,29)	370.000.000	Kec. Sit
				1.22.1.20.18.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah lembaga dan organisasi kemasyarakata yang dibina								6 Lembaga	90.000.000					6 Lembaga	90.000.000	Kec. Sit
				1.22.1.20.18.15.05	Peningkatan Pemberdayaan PKK	Jumlah PKK Desa yang dibina								6 Lembaga	50.000.000					6 Lembaga	50.000.000	Kec. Sit
				1.22.1.20.18.15.07	Fasilitasi Foum Layak Anak	Jumlah forum layak desa yang dibina								6 forum layak anak Desa	50.000.000					6 forum layak anak Desa	50.000.000	Kec. Sit
				1.22.1.20.18.15.09	Fasilitasi Tanggap Darurat Bencana	Julmlah kelompok tanggap dararut bencana yang difasilitasi								6 Kelompok	50.000.000					6 Kelompok	50.000.000	Kec. Sit
				1.22.1.20.18.15.10	Pendampingan Kota Sehat	Jumlah Desa yang melaksanakan Pokja Desa Sehat								6 Des/Kel	20.000.000					6 Des/Kel	20.000.000	Kec. Sit
				1.20.1.20.18.27.06	Dukungan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan	Jumlah Desa dan kelurahan yang melaksanakan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban								6 Des/Kel	100.000.000					6 Des/Kel	100.000.000	Kec. Sit
				1.20.1.20.18.27.07	Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen data AKP yang disusun								6 Des/Kel	10.000.000					6 Des/Kel	10.000.000	Kec. Sit

Thank you for using PDF Suite

1	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Situbondo Yang Baik	1. Nilai Survey IKM	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai survey IKM Kecamatan Situbondo	**1.20**	**URUSAN KECAMATAN**																	
				1.20.1.20.18.19	**Program Peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan**	**Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan**										**100%**	**195.000.000**	**100%**	**18.000.000**	**100%**	**360.000.000**	**Kec. Sit**
					Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai survey IKM										B 80	180.000.000	B 82	180.000.000	B 85	360.000.000	Kec. Sit
						Jumlah layanan PATEN yang difasilitasi sesuai SOP										10 unit layanan	180.000.000	15 unit layanan	180.000.000	25 unit layanan	360.000.000	Kec. Sit
					Penyusunan IKM	Jumlah Dokumen yang disusun										1 dok	15.000.000	1 dok	18.000.000	5 dok	360.000.000	Kec. Sit
		2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan Administrasi Desa Tertib dan Baik 2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	1.20.1.20.18.33	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa**	**Persentase kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa**										**100%**	**1.887.980.000**	**100%**	**1.920.000.000**	**100%**	**3.807.980.000**	**Kec. Sit**
					Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti Bidang Pemerintahan										12 rekomendasi	500.000.000	12 rekomendasi	500.000.000	24 rekomendasi	1.000.000.000	Kec. Sit
						2. Jumlah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan Administrasi Desa Tertib dan Baik										4 desa		4 desa		4 desa		
					Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Perekonomian Pembangunan										12 rekomendasi	500.000.000	12 rekomendasi	500.000.000	24 rekomendasi	1.000.000.000	Kec. Sit
						2. Jumlah Desa yang telah memiliki BUMDes dengan Usaha Produktif yang Berkembang										2 desa		4 desa		4 desa		
					Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, serta Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Kesejahteraan Rakyat										12 rekomendasi	400.000.000	12 rekomendasi	400.000.000	24 rekomendasi	800.000.000	Kec. Sit
						2. Jumlah Keluarga Miskin yang Terakomodir dalam data AKP										80%		70%		60%		
					Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum										12 rekomendasi	200.000.000	12 rekomendasi	200.000.000	24 rekomendasi	400.000.000	Kec. Sit
						2. Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Kamtibmas dan Linmas										120		120		120		
					Kegiatan Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan										4 Desa	267.980.000	4 Desa	300.000.000	4 Desa	567.980.000	
					Kegiatan Dukungan Urusan Kesehatan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bumil Risti dan Bayi Stunting yang difasilitasi										4 Desa	20.000.000	4 Desa	20.000.000	4 Desa	40.000.000	
	2. Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Situbondo		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**										**100%**	**479.380.000**	**100%**	**495.580.000**	**100%**	**974.960.000**	**Kec. Sit**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim										500 Lbr	2.160.000	500 Lbr	2.160.000	500 Lbr	4.320.000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang dibayar										4 Jenis	55.800.000	4 Jenis	72.000.000	4 Jenis	127.800.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan yang terbayar										13 unit STNKB	5.000.000	13 unit STNKB	5.000.000	13 unit STNKB	10.000.000	
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar										10 Orang	92.520.000	10 Orang	92.520.000	10 Orang	185.040.000	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor										8 Orang	106.900.000	8 Orang	106.900.000	8 Orang	213.800.000	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia										20 Jenis	14.850.000	20 Jenis	14.850.000	20 Jenis	29.700.000	

Thank you for trying PDF Suite

1	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang										48000 Lbr	12.600.000	48000 Lbr	12.600.000	48000 Lbr	25.200.000	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia										10 Jenis	10.000.000	10 Jenis	10.000.000	10 Jenis	20.000.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang tersedia										2 Jenis	3.600.000	2 Jenis	3.600.000	2 Jenis	7.200.000	
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan										1200 peserta	20.000.000	1200 peserta	20.000.000	1200 peserta	40.000.000	
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	Jumlah petugas yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi										15 Petugas	40.000.000	15 Petugas	40.000.000	15 Petugas	80.000.000	
					Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Jumlah tenaga administrasi / Teknis yang tersedia										1 Orang	12.000.000	1 Orang	12.000.000	1 Orang	24.000.000	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli										25 Stel	5.000.000	25 Stel	5.000.000	25 Stel	10.000.000	
					Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dokumen yang disusun										1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	6.000.000	
					Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Jumlah peserta PHBA yang mengikuti										250 Orang	67.600.000	250 Orang	67.600.000	250 Orang	135.200.000	
					Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah peserta PHBN yang mengikuti										125 Orang	10.000.000	125 Orang	10.000.000	125 Orang	20.000.000	
					Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Jumlah peserta HARJAKASI yang mengikuti										150 Orang	18.350.000	150 Orang	18.350.000	150 Orang	36.700.000	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**										**100%**	**205.236.800**	**100%**	**206.000.000**	**100%**	**411.236.800**	**Kec. Sit**
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang diadakan										6 Jenis	44.700.000	5 Jenis	40.000.000	5 Jenis	84.700.000	
					Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan										5 Jenis	16.500.000	5 Jenis	16.000.000	5 Jenis	32.500.000	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara										1 unit gedung	10.000.000	1 unit gedung	10.000.000	1 unit gedung	20.000.000	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara										1 unit gedung	18.000.000	1 unit gedung	18.000.000	1 unit gedung	36.000.000	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara										13 Unit kendaraan	106.036.800	14 Unit kendaraan	110.000.000	14 Unit kendaraan	216.036.800	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara										8 Jenis	10.000.000	10 Jenis	12.000.000	10 Jenis	22.000.000	
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**										**100%**	**58.600.000**	**100%**	**58.600.000**	**100%**	**117.200.000**	**Kec. Sit**
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LKIP dan yang tersusun										1 dok	5.500.000	1 dok	5.500.000	2 dok	11.000.000	
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun										2 dok	5.000.000	2 dok	5.000.000	2 dok	10.000.000	
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun										1 dok	8.000.000	1 dok	8.000.000	1 dok	16.000.000	
					Penyusunan RKA-DPA	Jumlah dokumen RKA-DPA yang tersusun										2 dok	18.000.000	2 dok	18.000.000	4 dok	36.000.000	
					Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah laporan LPPD yang tersusun										1 dok	3.100.000	1 dok	3.100.000	2 dok	6.200.000	
					Penyusunan Laporan Inventarasasi Barang SKPD	Jumlah laporan Inventaris Barang SKPD yang tersusun										1 dok	4.000.000	1 dok	4.000.000	2 dok	8.000.000	
					Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen RENJA SKPD yang disusun										1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	2 dok	10.000.000	
					Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen Monografi Kecamatan yang disusun										1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	2 dok	20.000.000	

Thank you for using PDF Suite